

**IMPLEMENTASI PERANAN BPKP PERWAKILAN SUMATERA BARAT  
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN PEMBANGUNAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat*

*Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

**Muhammad Diva Agredi**  
**1710012111142**

**PROGRAM KEKHUSUSAN**

**HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2022**

**Noreg: 18/skripsi/HTN/FH/II-2022**

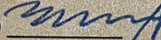
**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/II-2022

Nama : **Muhammad Diva Agredi**  
NPM : **1710012111142**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Implementasi Peranan BPKP Perwakilan Sumatera Barat Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan**

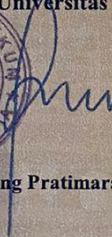
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara hari **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dinyatakan **LULUS**.

1. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H** (Pembimbing) 

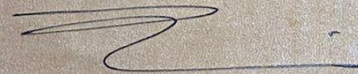
Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



  
(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.)



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

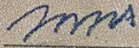

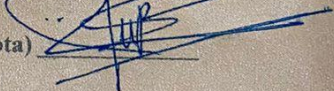
**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No. Reg : 18/Skripsi/HTN/FH/II-2022**

Nama : **Muhammad Diva Agredi**  
NPM : **1710012111142**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **Implementasi Peranan BPKP Perwakilan Sumatera Barat Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan**

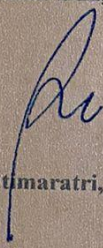
Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Bagian Hukum Tata Negara hari **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua** dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H.,M.H.** (Ketua) 
2. **Dr. Maiyestati, S.H., M.H.** (Anggota) 
3. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.** (Anggota) 

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



  
**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**IMPLEMENTASI PERANAN BPKP PERWAKILAN SUMATERA BARAT  
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH  
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN PEMBANGUNAN**

Muhammad Diva Agredi<sup>1</sup>, Boy Yendra Tamin<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: [divaagredi06@gmail.com](mailto:divaagredi06@gmail.com)

**ABSTRAK**

Perpres Nomor 192 Tahun 2014 Pasal 2 “BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan keuangan Negara/daerah dan pembangunan nasional. BPKP sendiri adalah salah satu lembaga pengawas internal pemerintah yang memegang peran penting dalam pengawasan. Rumusan Masalah 1)Prosedur yang dilakukan BPKP dalam melakukan pengawasan keuangan daerah di Sumatera Barat? 2)Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPKP dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah di Sumatera Barat. Jenis Penelitian yaitu yuridis sosiologis. menggunakan sumber data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, data dikumpulkan melalui studi dokumen. Berdasarkan penelitian 1)BPKP bertindak sebagai auditor internal pemerintah dengan tugas memanfaatkan hasil pekerjaan ITJEN, BAWASDA Aparatur Pengawasan Pemerintah lainnya. dan BPKP berperan khususnya dalam pengungkapan adanya penyelewengan dana yang di kelola oleh pemerintah setelah adanya audit internal dan indikasi adanya penyalahgunaan dana kemudian mengolah temuan dan rekomendasi serta memantau pelaksanaan tindak lanjutnya. 2)Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pengawasan keuangan negara serta pembangunan, masih terbatasnya tenaga profesional dalam sistem pemerintahan dan pembangunan, baik di pusat maupun di daerah yang memiliki kemampuan teknis dan manajerial, baik mengenai kebijakan maupun peraturan perundang-undangan terkait, kondisi lingkungan serta substansinya. proyek, terutama dalam rangka pelaksanaan program dan proyek pembangunan dan dilengkapi dengan pengetahuan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan data pemantauan.

**Kata Kunci : BPKP, Keuangan Daerah, Pengawasan**

## DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

A....Latar Belakang.....	1
B....Rumusan Masalah.....	5
C....Tujuan Penelitian.....	5
D....Metode Penelitian.....	5

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1....Tinjauan Tentang Pengawasan	
a....Pengertian Pengawasan.....	10
b....Jenis-jenis Pengawasan.....	11
c....Fungsi dan Maksud Pengawasan.....	14
2....Tinjauan tentang Keuangan Daerah	
a....Pengertian Keuangan Daerah.....	15
b....Lingkup Keuangan Daerah.....	16
c....Asas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	17
3. Tinjauan Tentang BPKP Selaku Badan Pengawasan Keuangan	
a....Pengertian BPKP.....	19
b....Tugas dan Wewenang BPKP.....	19

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A...Proses Dan Langkah Yang Dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Daerah di Sumatera Barat.....	23
B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Daerah Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Sumatera Barat.....	42

## **BAB IV PENUTUP**

<b>A..Simpulan.....</b>	<b>57</b>
<b>B..Saran.....</b>	<b>58</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**